

Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Bank Syariah Indonesia Tbk

Diana Puspitasari¹; Andi Neneng Sugi Hartati

Universitas Budi Luhur. 2332600077@student.budiluhur.ac.id, 2332600051@student.budiluhur.ac.id

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan dan
Investasi)

Vol.7, No.3, Mei 2024
Halaman : 274 – 289

© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

Good Corporate Governance;
Financial Performance;

JEL. classification :

C33, G21, G24, N15, N25

Contact Author :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangerang Selatan –
Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email :
sekuritas@unpam.ac.id

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap efektivitas operasional perbankan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Tbk. Penelitian yang dilakukan Didi Achjari dan rekannya yang dipublikasikan pada 20 Januari 2019 menyelidiki hubungan antara penerapan tata kelola perusahaan dan keberhasilan finansial perusahaan-perusahaan Asia Tenggara yang bergerak di industri telekomunikasi dan teknologi antara tahun 2015 dan 2017.

The purpose of this research is to get an understanding of the influence that Good Corporate Governance (GCG) has on the effectiveness of Bank Syariah Indonesia Tbk's financial performance. This research was carried out by Didi Achjari and colleagues on January 20, 2019, and it was published under the title GCG adoption and financial performance in the telecoms and technology industry in Southeast Asia from 2015 to 2017. Findings from the research highlight the importance of public trust and loyalty to businesses as GCG factors influencing Indonesia's economic performance. A key independent variable that substantially affects the caliber of the company's investment decisions is the company's classification within a certain industry. Statistical analysis, however, has shown that variables like company size, profitability, modal distribution rate, and leverage are insignificant. The main objective of the CGPI program is to encourage top-level corporate executives to adopt the Tata Kelola Perusahaan concept. The program also seeks to hasten development by encouraging the active pursuit and application of the most effective GCG practices in economics and business across all societal sectors. Keeping one's finances under check, particularly while determining a project's viability.

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan segala permasalahan mengenai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk namun tidak terbatas pada keanggotaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pendiriannya wajib mematuhi prosedur operasional dan teknis yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang bidang penelitian ini. Seseorang wajib mematuhi sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka mendirikan suatu usaha. Menurut Ismail (2011), tujuan perbankan syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan negara dengan meningkatkan kekompakan, harmoni, dan solidaritas masyarakat. Inilah tepatnya sistem keuangan Islam.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 yang diterbitkan Bank Indonesia menyebutkan perwalian sebagai salah satu jenis kegiatan operasional perbankan yang dilakukan. Ketika kita berbicara tentang kepercayaan, yang kita maksud adalah sejenis perusahaan perbankan yang mencakup investasi dan menghasilkan uang. Salah satu komponen peraturan tersebut adalah perwalian. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengantisipasi bahwa bank akan menangani uang tersebut dengan cara yang berpengetahuan dan dapat dipercaya (perilaku agen fidusia). Dokumen GCG Perbankan Indonesia yang disetujui oleh Komite Nasional Advokasi Kebijakan Perdagangan pada bulan Januari 2004 menjadi landasan berdirinya Global Compliance Group (GCG). Tujuan utama dokumen ini adalah untuk melindungi pihak-pihak yang rentan. Selain itu, artikel ini memberikan gambaran mengenai lima pilar yang berkontribusi terhadap GCG, yaitu keterbukaan, tanggung jawab, otonomi, pendidikan, dan keadilan.

Dalam peran gandanya sebagai pemberi pinjaman dan perantara keuangan, bank diharapkan dapat meminjamkan uang kepada orang atau badan usaha yang memerlukan permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di sektor riil (agen pembangunan). Bank juga diharapkan akan memberikan bantuan dalam desentralisasi guna memfasilitasi terciptanya pemerataan pembangunan, yang merupakan agen kesetaraan, yang pada akhirnya akan menghasilkan perekonomian yang stabil dan kompetitif. Berdasarkan Resolusi 10 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada tahun 1998, bank memerlukan manajemen yang efektif untuk meningkatkan profitabilitasnya, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatannya, yang pada gilirannya meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Besarnya keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mencapai sasaran, maksud, dan visinya melalui pelaksanaan aktivitas tertentu disebut sebagai kinerja perusahaan. Pemahaman tentang pekerjaan yang sedang dilakukan memungkinkan lembaga keuangan untuk memastikan tingkat keberhasilan yang telah mereka capai dalam menjalankan operasinya, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mempersiapkan masa depan.

Dalam bisnis perbankan syariah, seluruh kegiatan operasional wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup berbagai fungsi, termasuk penerimaan uang dan pembiayaan perusahaan. Ini mencakup berbagai tanggung jawab yang saat ini masih diperdebatkan. Ada kemungkinan lebih besar bahwa akademisi akan melihat hasil mereka melalui prisma hukum Syariah setelah insentif ini dimasukkan. Mengingat latar belakang yang menempatkan fokus yang kuat pada syariah, operasional perbankan yang sesuai dengan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, visi syariah ini memuat konsep tata kelola perusahaan yang terbukti cukup efektif. Konsekuensinya, menurut Rifka (2010), tujuan penggabungan nilai-nilai Syariah ke dalam prinsip-prinsip Syariah adalah untuk memudahkan pembentukan lembaga keuangan Syariah yang bereputasi dan menjamin tertib administrasi transaksi moneter, komersial, dan sosial.

Dengan kata lain, bank yang menganut prinsip syariah akan mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja bisnis, menurunkan risiko pengambilan keputusan yang bias, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap alokasi uang, yang merupakan faktor-faktor yang berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, tujuan tata kelola perusahaan yang baik

adalah untuk mendorong investor. kepercayaan pada alokasi uang. Struktur tata kelola perusahaan yang kuat akan sangat membantu dalam perluasan praktik-praktik ini. (Kusuma dalam Ristifani, 2009).

Berdasarkan uraian dan bukti empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu maka peneliti terkait untuk menguji “ **Analisis Pengaruh Good Coporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Tbk**”.

B. KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Sejarah Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) dinilai menjadi harapan pemerintah dan pelaku komersial di sektor perbankan untuk memperkuat pasar keuangan syariah global di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia memilih menganut agama Islam. Oleh karena itu, aktivitas bank tersebut dimulai pada Senin, 1 Februari 2021, setelah peresmian Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlangsung pada hari itu juga. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan rencana pertumbuhan keuangan syariah. Ini menandai awal dari segalanya. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif mendorong merger dan konsolidasi bank syariah dan organisasi usaha syariah milik pemerintah. Transaksi ini dilakukan pada tahun 2019. Hal ini tentu sangat membahagiakan bagi bank syariah. Ada sejumlah bank yang direkomendasikan OJK, seperti PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara, merger bank syariah milik negara yakni PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, BTN Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri diperkirakan akan terjadi pada 2 Juli 2020. Demikian informasinya. diungkapkan oleh Menteri. Segera setelah selesainya merger yang terjadi pada akhir Oktober 2020, perusahaan pelat merah tersebut mengutarakan niatnya untuk membangun bank syariah dengan menyatukan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk didirikan pada 11 Desember 2020, sebagai hasil penggabungan tiga bank yang sebelumnya telah berdiri bersama. Sesuai surat bernomor Referensi SR-3/PB.1/2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin konsolidasi tiga lembaga keuangan syariah pada 27 Januari 2021. Surat itu menjelaskan situasinya. Konsekuensinya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo resmi mendirikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

GCG (Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG merupakan Keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, profesionalisme, dan kesetaraan merupakan beberapa prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009. Standar-standar ini dimaksudkan untuk mengatur industri perbankan. Dikenal juga dengan sebutan GCG yang merupakan singkatan dari inisial GCG. Bank Dunia menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif mengawasi operasi pemilik, direktur, dan manajer perusahaan, serta alokasi sumber daya, penilaian kinerja, dan pelaporan kepada kreditor dan pemegang saham. Selain itu, tata kelola perusahaan yang kuat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor. Rangkaian tindakan ini diatur oleh konsep tata kelola perusahaan yang baik, yang mempertimbangkan aspek organisasi, standar, dan ekonomi. Menurut Sayidah (2007: 210) yang mengutip Keasey dan Wright, terdapat dua elemen kunci yang mempengaruhi dimana tata kelola perusahaan berada. Mengawasi dengan cermat seberapa efektif manajer melakukan tugasnya dan memastikan bahwa pemegang saham memenuhi setengah dari perjanjian akuntabilitas adalah dua aspek terpenting dari tata kelola perusahaan yang baik. Aspek ini terkait dengan aspek pertanggungjawaban dan akuntabilitas tata kelola perusahaan. Kedua, kerangka, metode, dan proses tata kelola yang memotivasi aktivitas manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis dan perusahaan. Ketika upaya dilakukan untuk membangun struktur dan proses tata kelola yang membantu

meningkatkan kinerja, kedua sudut pandang ini perlu dipertimbangkan. Kesimpulan ini dapat diambil dari beberapa definisi yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah:

- a. Suatu struktur yang bertugas memantau dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lain dalam perusahaan mampu menjaga hubungan harmonis satu sama lain.
- b. Sistem checks and balances menggabungkan keseimbangan kekuasaan atas kontrol perusahaan, yang berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya dua peluang: kesalahan penanganan aset perusahaan dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Agar tidak terlalu meluas, ada dua aspek yang perlu diabaikan.
- c. Suatu metode yang terbuka dan jujur untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, menetapkan dan mencapai tujuan tersebut, dan mengevaluasi kinerjanya.

Adapun Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance antara lain :

- a. **Transparansi (transparency),**
Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah Kesalahan yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan dan evaluasi relevansi serta kegunaan data termasuk dalam kategori ini. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2004), ketika sebuah perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang efektif, maka perusahaan tersebut mampu bereaksi terhadap setiap masalah yang mungkin berkembang secara tepat waktu dan tepat. Informasi komprehensif mengenai status keuangan perusahaan saat ini, serta aset, kewajiban, dan aktivitasnya, disertakan dalam laporan ini saat ini. Di sisi lain, data yang diungkapkan perlu dimuat dalam satu prosedur yang dijalankan dengan baik. Selain itu, manajemen diharuskan untuk mendapatkan jasa auditor eksternal yang independen guna memeriksa kebenaran laporan keuangan. Saat membuat rekening bank yang sesuai dengan hukum Syariah, penting untuk memberikan perhatian khusus pada hubungan antara pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan kekayaan yang dimiliki individu. (Wibowo, 2009).
- b. **Pertanggungjawaban (responsibility),**
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah Prinsip-prinsip pemberian pinjaman bank dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, serta menghormati norma-norma bank. Di sisi lain, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2004) menyatakan bahwa tanggung jawab mencakup tanggung jawab kepada manajer dalam manajemen, kewajiban terhadap pengawasan manajemen, dan kewajiban kepada perusahaan dan pelaku pasar saham. Tata kelola perusahaan harus menekankan kepentingan para pemangku kepentingan, sebagaimana diuraikan dalam definisi, dan harus mendorong kolaborasi aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan di bidang penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, dan integrasi bisnis. Konsep ini mendasari pemikiran bahwa tata kelola perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan.
- c. **Akuntabilitas (accountability),**
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah memberikan penjelasan mengenai cara kerja dan pengoperasian organ perbankan agar transaksi dapat berjalan lancar. Tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menyadari apa yang dilakukannya, bahwa manajemennya tidak melakukan apa pun, dan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik itu pemegang saham, perusahaan, atau perusahaan. pemangku kepentingan lainnya. Sebagian Direksi mempunyai akses terhadap informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan; bagian lainnya melakukan investigasi independen yang terpisah dari manajemen; dan bagian ketiga adalah pemahaman bahwa anggota dewan berkewajiban untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Konsep tanggung jawab yang dikemukakan Linan dalam Hastuti (2005) adalah sebagai berikut. Agar

transaksi moneter dianggap sah, transaksi tersebut juga harus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Syariah. Menjaga kesesuaian dengan kriteria lembaga syariah dalam pengawasan operasional bank syariah merupakan peran penting Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah.

- d. Profesional (professional),
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah Ada sejumlah kriteria yang diperlukan, antara lain memiliki keahlian yang unggul, mampu menjaga imparialitas dan bebas dari pengaruh luar, serta memiliki komitmen yang mendalam terhadap pengembangan bank syariah. Untuk meminimalkan kemungkinan konflik kepentingan, strategi ini menekankan perlunya manajemen yang kompeten di perbankan syariah, yang idealnya bebas dari intervensi atau pengaruh pihak luar. Meskipun demikian, “sebuah entitas ekonomi dengan tata kelolanya sendiri” adalah credo setiap bank; Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan memberikan penilaian yang benar-benar objektif.
- e. Kewajaran (fairness),
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah Dalam penerapan hak pemegang saham, ada keberhasilan dan kegagalan, tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada jangka waktu tersebut. Sesuai dengan Financial Conduct and Governance Institute (FCGI), elemen instruksional berikut dimasukkan ke dalam program ini: Ketika berurusan dengan pemegang saham minoritas dan pemegang saham luar negeri, serta pelaku lain di pasar saham dan operasi bisnis, metodenya yang dimaksud adalah sama. Untuk mencegah insider trading, pelaku pasar dapat memperoleh keuntungan dari pemisahan tugas kepemilikan dan pengungkapan informasi penting.

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kinerja adalah pengukuran eksternal terhadap kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional organisasi dalam pemanfaatan asetnya (Helfert, 1996, sebagaimana diacu dalam Nuswandari, 2009). Kemunduran korporasi yang meluas dapat diklasifikasi menjadi dua kategori berbeda: kemunduran non-finansial dan kemunduran finansial. Proses peningkatan operasional perusahaan melalui pemanfaatan informasi non-finansial yang lebih erat kaitannya dengan persyaratan kualitas layanan bagi konsumen disebut sebagai “pekerjaan non-finansial”, dan kata “pekerjaan non-finansial” juga merujuk pada aktivitas tersebut. . Sebaliknya, pengukuran kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi kinerja suatu perusahaan dengan memanfaatkan informasi mengenai situasi keuangannya. Laba dan neraca rugi merupakan informasi keuangan yang paling sering digunakan (Purwaningtyas, 2011).

Jika bank tidak dapat terus menjalankan operasinya dengan profitabilitas yang memadai dan layanan penyimpanan yang memadai, serta peraturan perbankan yang hati-hati, terdapat risiko bahwa nilai saham dan jumlah uang yang dimiliki pemegang saham akan menurun. Hal ini disebabkan oleh potensi bank tidak mampu menjaga regulasi kehati-hatian perbankan yang memadai. Kenaikan nilai saham dan jumlah modal merupakan dua indikator yang tidak ambigu yang dapat digunakan untuk menentukan apakah masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang mampu membayar utang atau tidak. Dengan mengkaji Kualitas Aset dan Laba (Earning), cara penilaian yang pertama dikembangkan oleh BI (PBI) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Negara Berdasarkan Prinsip Syariah. Teknik ini dibentuk dalam rangka menilai kesehatan perbankan nasional.

A. Aset:

Aset (Assets) yaitu aset yang dimiliki oleh suatu korporasi (Rodoni & Herni, 2014). Sumber daya yang tersedia bagi suatu organisasi pada suatu waktu atau dalam jangka waktu yang lebih lama disebut sebagai aset yang tersedia bagi organisasi. Aktifitas dapat dibagi menjadi tiga kategori, seperti dikemukakan oleh Kasmir (2018): lancar, tetap, dan aktivitas tambahan. Menurut Kertonegoro (1995), kata

“aktiva” atau “aset” dapat digunakan untuk merujuk pada entitas moneter dan non-moneter yang dianggap sebagai aset. Ketika kita berbicara tentang aset keuangan, yang kita maksud adalah aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang likuid. Beberapa contoh aset tersebut antara lain tabungan, deposito, investasi pada asuransi, dan pembelian saham atau obligasi. Aset tersebut mencakup tanah dan bangunan, hewan, konstruksi, dan irigasi, dan diklasifikasikan sebagai aset non-keuangan. Akta-akta yang dijual untuk keperluan usaha juga termasuk dalam kategori ini. (Hery, 2019)

B. Laba:

Laba merupakan Audit merupakan salah satu komponen pelaporan keuangan suatu perusahaan yang seringkali dibutuhkan oleh pasar keuangan. Tujuan audit adalah untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan dan memantau perubahan kekayaan pemegang saham selama periode waktu tertentu. pasar keuangan seringkali diminta untuk melakukan audit. Menurut Yanti dan Darmayanti (2019), tujuan dasar pengelolaan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dikontribusikan oleh pemegang saham dan untuk menjamin keamanan pemegang saham. Pengertian laboratorium ini adalah akuntansi laba, yaitu suatu metode yang menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk memantau transaksi keuangan yang terjadi di dalam organisasi. Salah satu fungsi laboratorium operasional adalah memberikan indikator pilihan investasi yang telah dilakukan organisasi. Istilah "keuntungan ekonomi", yang juga dikenal sebagai "adapun laba ekonomi", menggambarkan jumlah aset yang dapat digunakan tanpa membuat pemilik aset tersebut menjadi lebih sejahtera secara finansial. Oleh karena itu, ketika uang disebut dengan “laba ekonomi”, maka penekanan yang diberikan pada uang dalam anggaran akan sesuai dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018) Variabel penelitian adalah Peneliti membuat catatan tentang suatu kualitas, atribut, item, organisasi, atau aktivitas yang dapat mengambil beberapa bentuk untuk mempelajarinya dan kemudian menggunakannya sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya. Satu variabel terikat dan satu variabel bebas diteliti dalam penelitian ini. Ada sejumlah faktor yang terlibat dalam penelitian ini :

- Variabel bebas (independent variable) merupakan Menurut Sugiyono (2018), Satu-satunya variabel yang kita miliki disini variabel terhubung adalah unsur independen yang tetap mempunyai pengaruh terhadap variabel-variabel yang bergantung padanya. Penelitian ini menggunakan Good Corporate Governance (GCG) (X) sebagai variabel dependen dalam penelitiannya.
- Variabel terkait (dependent variable) merupakan apabila suatu variabel hadir maka menyebabkan hadirnya variabel lain juga. Dengan kata lain, ini cukup mudah. Kinerja (Y) merupakan variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian Sebelumnya

Adapun peneliti sebelumnya menguraikan tentang Pengaruh good corporate governance (GCG) Terhadap Kinerja sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Didi Achjari dkk, (2009) mengenai penerapan good corporate governance (GCG) dan financial labor pada sektor telekomunikasi dan teknologi di Asia Tenggara telah diperoleh hasil bahwa ditemukan bahwa kepemilikan publik dan partisipasi perusahaan merupakan dua faktor GCG yang berdampak negatif terhadap tenaga kerja keuangan di Indonesia. Mentalitas perusahaan, independensi kebijakan pemerintah, kualitas audit surat pinjaman, dan tingkat penetrasi aset adalah beberapa karakteristik GCG yang mempunyai pengaruh di Malaysia. Sebaliknya, di Thailand, setiap variabel mempunyai pengaruh terhadap mata uang tenaga kerja, namun di Filipina, setiap

variabel tidak mempunyai pengaruh terhadap mata uang kerja. Berbagai faktor, seperti ambang batas aset pengembalian dan jumlah anggota GCG, berdampak pada keberhasilan bisnis di Vietnam.

2. Berdasarkan temuan penelitian yang dihipotesiskan, Sam'ani (2018) melakukan penelitian pada bidang Pengaruh GCG dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di BEI . Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang baik dan substansial antara pengaruh tata kelola perusahaan, yang diselidiki oleh aktivitas komite, jumlah simpanan langsung, dan komite audit, dan pekerjaan yang dilakukan pegawai bank di Indonesia. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif dan substansial antara kinerja dengan kekuatan institusional dan rasio leverage. Sebaliknya, variabel komisi independen tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai bank di Indonesia.
3. penelitian yang dilakukan oleh Ferry Adriawan Pramono pada tahun 2011 diberi nama "Analisis Dampak Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Corporate Governance Dalam Rencana Jangka Panjang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melaporkan Di BEI)." Berdasarkan temuan penelitian, kategorisasi sektor merupakan variabel independen yang mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas kebijakan dan prosedur tata kelola perusahaan. Di sisi lain, kualitas tata kelola perusahaan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat penetrasi modal, atau rata-rata saham.
4. Komang Meitradi Setyaan (2013) melakukan penelitian dengan judul "Pentingnya Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perkreditan Daerah Mengwi Provinsi Badung." Penelitian ini telah dipublikasikan pada tahun 2013. Tata kelola perusahaan yang efektif mempunyai pengaruh yang positif dan besar terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Mengwi Kabupaten Badung, sesuai dengan temuan uji hipotesis yang menghasilkan kesimpulan bahwa memang demikian. Salah satu kelebihan penelitian ini adalah memanfaatkan variabel ROA untuk mengevaluasi kinerja keuangan LPD dibandingkan dengan GCG dan proyek lainnya. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki ciri umum yang disebut dengan Good Corporate Governance (GCG). Ada kemungkinan kesimpulan spesifik penelitian akan berbeda satu sama lain, terutama pada bidang tata kelola perusahaan dan berbagai aktivitasnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraini (2013) dengan judul "Implikasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009 hingga 2012" memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Komite tentang Kinerja Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan. Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kinerja perusahaan yang bergerak di sektor tekstil dan pakaian jadi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009 dan 2012.

Kerangka Konseptual

Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah pedoman perilaku lembaga keuangan yang didasarkan pada sejumlah konsep, termasuk namun tidak terbatas pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan. Jika mengacu pada cara kerja luar suatu korporasi dalam jangka waktu tertentu, digunakan kata "kinerja". Kinerja adalah konsekuensi atau kinerja kegiatan operasional organisasi terhadap aset yang dimilikinya. Gambar diagram konseptual yang dapat dilihat di bawah ini menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor yang bersifat dependen dan faktor-faktor yang independen dalam penelitian ini:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesa

Menurut Sugiyono (2014), hipotesis adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pembuatan pertanyaan penelitian. Dikatakan bahwa keputusan pertama, meskipun didasarkan pada teori terkait, tidak didasarkan pada fakta aktual yang dikumpulkan melalui proses penyimpanan dan pengumpulan data. Hipotesis penelitian dapat digunakan sebagai dasar perencanaan:

H1: Good Corporate Governance (CGC) berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia Tbk.

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk tujuan melakukan studi terhadap keadaan suatu hal dengan cara yang tidak memihak atau alami, teknik penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang rumit dan ekstensif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai alat kritis (Sugiono, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan yang telah dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia di situs resmi Bank Syariah Indonesia antara tahun 2020 hingga 2022.

Sumber Data

Data primer

Dalam penelitian khusus ini, salah satu contoh pengumpulan data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian adalah data primer tentang perbankan syariah. (Sugiono, 2017).

Data Sekunder

Data sekunder Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini tidak disampaikan kepada orang yang mengumpulkannya secara langsung, seperti melalui kertas atau cara lain. (Sugiono, 2017).

Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 macam antara lain:

- Variabel bebas (independent variable) X : Good Corporate Governance
- Variabel terikat (dependen variable) Y : Kinerja

Tabel 1 Operasional Variabel

Jenis variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Independen (X)	Good Corporate Governance	menurut Bank Dunia adalah disiplin ilmu ekonomi, seperangkat aturan, norma, dan struktur yang mengontrol tindakan pemilik, direktur, dan manajer perusahaan. Struktur ini juga mengatur penilaian dan	Dalam •Transparansi terdapat •Pertanggungja waban •Akuntabilitas •Professional

	presentasi tugas dan hasil, serta presentasi hal-hal tersebut kepada investor (pemegang saham dan kreditor).	•Kewajaran
Independen (Y)	Pengukuran eksternal terhadap kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional perusahaan dalam pemanfaatan asetnya.	• Laba • Asset • ROE

Teknik Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan:

- Pengumpulan**
Data Umumnya, pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi, atau gabungan dari metode-metode tersebut di atas.
- Reduksi Data**
Kegiatan ini diselesaikan dengan menilai data yang diperoleh, membuat daftar, memilih item yang paling signifikan, dan mencarinya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh foto yang lebih jelas untuk dimanfaatkan dalam proses pengumpulan data.
- Penyajian Data**
Saat melakukan penelitian kuantitatif, merupakan praktik umum untuk menampilkan data menggunakan berbagai macam bagan dan grafik, termasuk diagram lingkaran, piktogram, tabel, dan grafik.
- Penarikan Kesimpulan / Verifikasi**
Setelah selesai tahap input data selanjutnya, hasilnya akan dibalik lalu dibalik satu lagi jika tidak ada kesalahan. Di sisi lain, jika temuan dibandingkan dengan data asli, hasil gabungannya mungkin cukup jelas.
Untuk menguji teori tersebut, harus menghadapinya dengan menggunakan Rumus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia Tbk, yang juga sering disingkat BSI atau disingkat Bank. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), lembaga keuangan mampu membangun sistem keuangan yang aman dan sah serta sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku, termasuk hukum syariah. GCG akan ditransfer ke infrastruktur bank oleh BSI sepanjang waktu, seperti yang ditunjukkan oleh hal ini.

Lembaga keuangan menyadari bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Global Corporate Governance (GCG) tidak menjamin bahwa tujuan bank akan konsisten dengan tujuan pihak-pihak yang terkena dampak. Hasilnya, BSI akan mampu mencapai tujuannya secara sistematis, sehingga menghasilkan lingkungan yang ideal untuk penerapan penggunaannya. Dalam skenario khusus ini, perubahan yang dilakukan oleh GCG harus terlihat jelas dan tidak terafiliasi dengan satu kelompok atau departemen mana pun. Mereka harus mewakili kebutuhan masa kini tanpa memihak sudut pandang tertentu.

A. Prinsip/Asas

1. Keterbukaan (Transparency)
 - .Membuat pihak-pihak terkait (stakeholder) mampu membandingkan dan mengakses informasi secara akurat, tepat waktu, jelas, dan akurat; informasi ini harus diberikan kepada mereka.
 - Memiliki kebijakan perusahaan yang terdokumentasi dan diungkapkan kepada pemangku kepentingan yang diwajibkan untuk menilai informasi yang disertakan dalam kebijakan tersebut harus menjadi suatu persyaratan.
 - Terapkan konsep kesetaraan dengan tetap mengingat fakta bahwa terjadi permutasi dan kemarahan yang terus-menerus.
2. Akuntabilitas (Accountability)
 - Salah satu cara untuk terus memberikan informasi kepada pemangku kepentingan adalah melalui penggunaan pernyataan bisnis dan strategi.
 - Anggota komite Komisaris, Syariah, dan Direksi, serta seluruh subkomite yang terkait erat dengan visi, tujuan, dan indikator kinerja utama perusahaan, harus diberi instruksi yang jelas dan rasa tanggung jawab yang kuat.
 - Setiap anggota Komisaris, Pengawas Syariah, dan Direksi, serta masing-masing cabang di bawahnya, mempunyai kemampuan yang penting dan menyadari kedudukannya dalam penyelenggaraan Persahaan Tata Kelola.
 - Di sisi lain, sistem checks and balances diterapkan dalam operasional perusahaan.
 - Kinerja didasarkan pada standar yang diterapkan secara konsisten pada nilai-nilai organisasi, tujuan bisnis, taktik strategi bisnis, dan sistem penghargaan dan hukuman.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Bank wajib mematuhi hukum dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini dapat dicapai dengan bersandar pada konsep keadilan dan kewajiban, menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, melakukan kontrol terhadap lingkungan, dan melaksanakan tugas sosialnya dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
4. Profesional (Professional)
 - Mengakui dominasi yang tidak dipahami oleh pemangku kepentingan, tidak dipengaruhi oleh kekhawatiran pemangku kepentingan, dan dihasilkan dari keadaan konflik kepentingan.
 - Mengkomunikasikan sudut pandang semua pihak terkait dengan cara yang tidak memihak dan bebas dari ambiguitas.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
 - Menekankan pentingnya setiap pemangku kepentingan berdasarkan kesetaraan perlakuan dan pendidikan.
 - Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan menunjukkan manfaatnya bagi Bank.
 - Memiliki sejumlah keahlian yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jawab.

TARProF adalah ciri pembeda dari konsep yang telah dibahas sebelumnya. Menurut ajaran Nabi Muhammad (saw), kerangka ini mencakup prinsip-prinsip berikut: ketaatan (shiddiq), pendidikan untuk umat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan nasihat profesional (fathanah). Prinsip-prinsip ini dirinci dalam kerangka ini.

40 tentang Negara Bagian Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2009 merupakan dua dokumen peraturan perundang-undangan tersebut. yang berperan dalam pembentukan struktur organisasi BSI. Organ Utama dan Organ Pendukung yang bercirikan kebijakan dan prosedur, mencirikan struktur GCG BSI yang cukup besar.

Self Assessment (Penilaian Mandiri) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah Indonesia Tbk

Peninjauan terhadap proses tata kelola internal perusahaan BSI merupakan kegiatan normal yang dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 10/SEOJK.03/2014. Keputusan ini berkaitan dengan evaluasi terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Dengan bertindak demikian, perusahaan memenuhi komitmennya kepada Mahkamah Agung. Metode yang digunakan oleh regulator untuk mengembangkan kriteria tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan menggunakannya untuk menilai kinerja manajemen bank disebut sebagai "evaluasi faktor-faktor GCG", dan frasa "evaluasi faktor-faktor GCG" merupakan ciri dari proses tersebut. Pada paruh kedua bulan Juni dan sesaat sebelum akhir bulan Desember, kami melakukan evaluasi terhadap lingkungan GCG di BSI. Evaluasi ini dilakukan dua kali dalam setahun. Hasil evaluasi diri yang dilakukan GCG adalah sebagai berikut: Terdapat lima kategori yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Evaluasi diri merupakan metode yang digunakan Compliance Group dalam melakukan evaluasi penerapan GCG.

Dalam proses penyelesaian self-assessment tersebut, kami mempertimbangkan secara matang sebelas (sebelas) variabel pelaksanaan GCG yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.

Mulai tahun 2022 Bank Syariah Indonesia Tbk juga menggunakan konsultan GCG dari pihak external

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Corporate Governance Perception Index (CGPI) digunakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) untuk melakukan survei terhadap dunia usaha pada tahun 2022. Beberapa di antaranya adalah BSI. Indeks Kinerja GCG (CGPI) adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan berdedikasi dalam mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik. Inisiatif Penetapan Harga Barang Modal (CGPI) diprakarsai oleh sekelompok entitas yang terdiri dari perusahaan publik (juga dikenal sebagai emiten), bank, dan badan usaha milik negara (juga dikenal sebagai BUMN).

Pemerintah, pemilik usaha, dunia usaha, dan organisasi yang memberikan bantuan kepada dunia usaha merupakan komponen ekosistem usaha. Tujuan dari program CGPI adalah untuk memastikan bahwa semua entitas ini menggunakan praktik ekonomi dan bisnis terbaik untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di antara semua entitas tersebut. Memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam proses menghasilkan nilai dipertimbangkan adalah salah satu tujuan utama program ini. Dunia usaha sangat didesak untuk menganut konsep kepemimpinan Tata Kelola Perusahaan (CG), dan tujuan dari program yang dikenal sebagai Inisiatif Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Publik (CGPI) ini adalah untuk melibatkan banyak lapisan masyarakat dalam proses mewujudkan GCG. Temuan Indeks Kinerja Tata Kelola Perusahaan (CGPI) menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia melakukan upaya bersama untuk meningkatkan cara mereka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut;

1. Langkah pertama adalah menetapkan standar atau tolak ukur tingkat kualitas ekstraksi GCG yang diinginkan.
2. Langkah kedua adalah memperkuat kebijakan internal perusahaan guna meningkatkan GCG.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dan investor terhadap perusahaan;
4. meningkatkan fungsi operasi internal perusahaan melalui penggunaan standar bisnis yang ketat dan beretika;
5. Mengatasi kesulitan strategis yang dihadapi perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas GCG
6. Tujuan keenam adalah untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pentingnya dan manfaat GCG.

Dalam CGPI 2021 dengan tema Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:

- a. Struktur Tata Kelola adalah sejauh mana organ, struktur, dan infrastruktur suatu korporasi mampu membangun sistem yang berketahanan dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan. Untuk mencapai tujuan menghasilkan nilai bagi pemangku kepentingan dan menjamin pembangunan berkelanjutan dengan cara yang etis dan bermartabat, sistem ini harus didasarkan pada nilai, prinsip, dan norma tata kelola.
- b. Penerapan proses dan prosedur operasional yang efektif dan efisien untuk membangun struktur perusahaan yang berketahanan dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi inilah yang dimaksud dengan istilah "Aspek Proses Tata Kelola". Tujuan dari sistem ini adalah untuk menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan dan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dengan cara yang etis dan bermartabat. Sistem ini dibangun berdasarkan nilai, prinsip, dan norma pemerintahan.
- c. Elemen-Elemen yang Membentuk Tata Kelola Ketika kita berbicara tentang hasil, yang kita maksud adalah hasil dan manfaat yang berhasil berkontribusi dalam membangun kapasitas perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi sambil tetap berpegang pada keyakinan, prinsip, dan standar tata kelola. Tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan sekaligus memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara yang etis dan bermartabat.

Hasil penilaian :

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Pemeriksaan terhadap prosedur tata kelola Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan bantuan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard. Scorecard ini merupakan kumpulan kriteria yang telah disetujui oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan dikembangkan oleh OECD. Setelah mengambil langkah-langkah ini, proses penerapan tata kelola akan dimulai, dan pelaksanaannya akan dijamin konsisten dan berdedikasi.

ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur tata kelola perusahaan di negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Silakan memanfaatkan berbagai sumber publik untuk mengumpulkan informasi. Sumber yang dicantumkan antara lain website perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan makalah lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Menurut ASEAN Chief Executive Officer Scorecard, berikut adalah komponen-komponen yang menyusunnya:

- a. Hak-hak Pemegang Saham
- b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- c. Peran Pemangku Kepentingan
- d. Pengungkapan dan Transparansi
- e. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Badan Pemerikngkatan Domestik (DRB) berfungsi sebagai tolak ukur bagi setiap negara peserta, dan ACMF menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan. DRB digunakan oleh regulator masing-masing negara. Merupakan tanggung jawab negara-negara anggota DRB lainnya di ASEAN untuk melakukan tinjauan sejawat (peer review) ketika DRB telah menyelesaikan penelitian dalam skala nasional. Menurut OJK, PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) ditunjuk sebagai DRB untuk menjalankan usaha di Indonesia pada tahun 2016.

Hasil penilaian

Bank Syariah Indonesia diakui sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik teratas dalam hal kapitalisasi pasar pada HUT ke-13 International Institute of Corporate Governance Conference and Award 2022. Untuk tujuan penentuan pemerikngkatan, ASEAN CG Scorecard (ACGS) digunakan.

Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia Tbk

Kami melakukan analisis terhadap penerapan Good Coporate Governance (GCG) terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia Tbk. Penerapan GCG dengan mengambil data score GCG yang dilakukan oleh compliance tim BSI yang sudah melakukan self assessment dan dihubungkan dengan pertumbuhan laba, total asset, ekuitas dan ROE.

Tabel 2 score GCG dan kinerja keuangan BSI 6 tahun terakhir

TAHUN	SCORE GCG	LABA	TOTAL ASSET	EKUITAS	ROE
2017	1.57	101	31,543	2,603	3.88%
2018	1.57	107	37,915	5,027	2.13%
2019	1.67	74	43,123	5,088	1.45%
2020	1.60	248	57,716	5,444	4.56%
2021	1.55	3,028	265,289	25,014	12.11%
2022	1.50	4,260	305,727	33,506	12.71%

Dari table diatas menunjukkan bahwa hubungan antara score GCG dengan pertumbuhan laba, total asset, ekuitas dan ROE BSI adalah berkorelasi positif. Dalam perhitungan kami, korelasi antara score GCG dengan ROE menunjukkan angka 0,78 yang berarti bahwa korelasinya adalah positif kuat dimana semakin baik penerapan GCG BSI akan menaikkan kinerja keuangan BSI.

E. KESIMPULAN

GCG memiliki hubungan yang cukup besar dengan kesuksesan finansial BSI, yang merupakan temuan utama dalam penelitian ini. Dengan demikian, kinerja keuangan organisasi diharapkan semakin membaik seiring dengan semakin tingginya skor GCG.

Sebagai konsekuensi dari penelitian ini, kami dapat menegaskan bahwa organisasi harus memanfaatkan GCG untuk mencapai tujuan yang telah diartikulasikan, yaitu mendirikan perusahaan yang sehat dan sejahtera. Agar korporasi dapat memanfaatkan informasi tersebut agar mekanisme GCG lebih optimal dan terkendali, maka diharapkan pengguna dapat mengikuti pelatihan GCG dengan mencatat transaksi keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, Didi. Dkk. 2009. Implementasi Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Studi Pada Sektor Telekomunikasi Dan Teknologi Di Asia Tenggara. *Jurnal Of Accounting Research* Vol. 12, No. 3. 215 – 233 Hal.
- Ahmad Rodoni Dan Herni. 2014. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Mitra Wacana
- Amelinda, Tiara Novia, And Lucky Rachmawati. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia."
- Amelinda, Tiara Novia, And Lucky Rachmawati. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia."
- Anggraini, Dina . 2013 . Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Textile Dan Garment , Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Fadillah, Rizki. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah."
- Fadillah, Rizki. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah."
- Hastuti, Theresia Dwi. (2005). Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi (Sna) Viii Solo.
- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Pt Grasindo
- Hisamuddin, Nur, And M Yayang Tirta K. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah."
- Hisamuddin, Nur, And M Yayang Tirta K. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah."
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/163122487266209-penguatan-perbankan-syariah-merger-atau-konsolidasi>. Diakses 8 Jan 2024
- <https://lr.bankbsi.co.id/gcg.html> Tata Kelola Laporan Gcg Diakses 8 Jan 2024
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210127203901-78-599282/ojk-resmi-lzinkan-merger-bank-syariah-bumh> Diakses 8 Jan 2024
- <https://www.ojk.go.id/Id/Data-Dan-Statistik/Laporan-Triwulan/Documents/Laporan%20Triwulan%20I-2014.pdf> Diakses 8 Jan 2024
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Perada
- Kertonegoro, Sentanoe. 1995. *Analisis Dan Manajemen Investasi*, Widya Press, Jakarta.
- Kurniawati, Meilia. 2019. "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah."
- Media.
- Nuswandari, Cahyani, 2009, Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta), *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Stikubank*, Semarang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/Pbi/2009 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/Pbi/2012 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/Pbi/2007 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Pramono, Ferry Adriawan, 2011, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Lq-45), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Pratiwi, Leni Nur, And Setiawan. 2019. "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah."

Pratiwi, Leni Nur, And Setiawan. 2019. "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah."

Purwaningtyas, Frysa Praditha, 2011. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2007-2009). Semarang: Universitas Diponegoro.

Referensi Sr-3/Pb.1/2021, Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pemberian Izin Penggabungan

Rifka, Dejavu .2011. Penerapan Gcg Pada Perbankan Syariah. <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-adaperbankan-syariah/>. [11 Oktober 2011].

Rojali, Ahmad. 2021. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Kota Medan."

Rojali, Ahmad. 2021. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Kota Medan."

Rossi, Rio Novianto: Panggabean, Rosinta Ria. 2012. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan."

Sam'Ani. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2004-2007. E-Jurnal. Vol 2 No 1 Hal 334-341. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sayidah, Nur. 2007. Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar Cgpi Tahun 2003, 2004, 2005). Jaai, Vol. 11, No. 1. Hal: 1-19.

Se Ojk Nomor 10/. Seojk.03/2014 Tentang. Penilaian. Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Setyawan, Komang Meitradi Dan Putri, I Gusti Ayu Made Asri Dwija. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal : 586 – 598

Siregar, Budi Gautama. 2021. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan."

Siregar, Budi Gautama. 2021. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan."

Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung.

Ulfa, Nurul. 2019. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tbk." 132.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wibowo, 2009. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Yanti Dan Damayanti. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 4, 2019.

Zahrawani, Devi Rizki:Sholikhah, Nining. 2021. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah."